

**Pendidikan Karakter Di Era Perkembangan
Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK)
Dalam Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Rini Triastuti

UNS, Surakarta

rinitrastuti@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah menawarkan berbagai kelebihan bagi penggunanya maka wajar bila semakin bertambah jumlah manusia yang memanfaatkannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini selain kita hidup dalam dunia nyata juga hidup dalam dunia maya. Karena kita selalu terhubung dalam jaringan internet setiap saat. Sebagaimana dalam dunia nyata setiap masyarakat selalu membutuhkan norma yang digunakan dalam mengatur pergaulan hidup bersama demikian pula dalam dunia maya juga menghendaki adanya norma yang sama. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih terabaikan. Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan tentang peran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk warga digital yang baik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah angket dan studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran dalam membentuk karakter warga negara secara umum dan khususnya sebagai warga digital.

Kata kunci : *Pendidikan, TIK, PPKn*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi. Jarak dan waktu bukan lagi menjadi penghalang dalam melakukan komunikasi. Semua dapat terhubung satu dengan lain dimanapun berada dalam waktu setiap saat. Dengan kemudahan tersebut wajar bila pengguna teknologi informasi dan komunikasi semakin bertambah setiap tahunnya. Data APJII (2014) Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2010 adalah sebesar 42 juta dengan jumlah penduduk 238,5 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetrasinya adalah sebesar 17,6%. Kemudian tahun 2011 pengguna internet meningkat menjadi 55 juta dengan jumlah penduduk 242

juta yang berarti terjadi penetrasi sebesar 22,7%. Tahun selanjutnya pengguna internet menjadi 63 juta dengan jumlah penduduk sebesar 245,5 juta yang berarti terjadi penetrasi sebesar 24,23%. Pada tahun 2013 pengguna internet meningkat menjadi 71,2 juta dengan jumlah penduduk sebesar 248,9 juta yang artinya terjadi penetrasi sebesar 28%. Kemudian di tahun 2014 pengguna internet menjadi 88,1 juta dengan jumlah penduduk 252,4 juta yang berarti terjadi penetrasi sebesar 34,9%. Data tersebut menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia menunjukkan tren yang bertambah dari tahun ke tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi semakin bertambah bahkan manusia semakin bergantung dengan padanya. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mempengaruhi perilaku. Berbagai persoalan seperti penyebaran konten bermuatan SARA, *hate speech*, pencemaran nama baik dan lain sebagainya melalui media sosial merupakan persoalan terkait dengan pemanfaatan teknologi.

Sebagaimana dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan adanya norma untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat tersebut. Demikian pula dalam dunia maya juga diperlukan norma untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat on line. Idealnya perkembangan teknologi diiringi dengan perkembangan norma bagi penggunaannya sehingga tidak terjadi kesenjangan diantara keduanya. Berbagai persoalan terkait dengan penyalahgunaan teknologi menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan norma yang mengaturnya. Hal tersebut menjadi sebuah keprihatinan karena teknologi yang pada mulanya dimaksudkan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya namun telah bergeser. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan bagaimanakah peran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk warga digital yang baik melalui kewarganegaraan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan instrumen angket dan studi pustaka. Lokasi penelitian adalah Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Semakin bertambahnya pengguna internet dikalangan masyarakat menunjukkan bahwa internet telah menjadi suatu kebutuhan dalam hidupnya bahkan tidak bisa lepas dari internet. Karena dengan terkoneksi dalam suatu jaringan tersebut dapat melakukan berbagai aktivitas dari melakukan panggilan telephon, mengirim pesan, mengirim file, browsing, berbelanja dan lain sebagainya.

Berdasarkan angket terhadap siswa diperoleh fakta sebagai berikut mayoritas siswa yaitu 43% atau hampir separuhnya mengakses internet setiap hari. Fakta tersebut didukung dengan 52% siswa mengakses media sosial setiap hari atau lebih dari separuhnya dan 25% siswa mengakses media sosial setiap jam, 90% siswa atau hampir keseluruhan tidak pernah mengikuti suatu pelatihan atau kursus secara khusus agar dapat mengoperasikan program-program komputer, memiliki karakter yang sangat aktif menggunakan jejaring teknologi digital dan memiliki kecakapan dalam mengoperasikan teknologi berbasis internet. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa-siswa merupakan warga digital dan memiliki karakteristik sebagai penduduk asli digital. Hal tersebut didasarkan pada pandangan Mossberger, Tolbert, dan McNeal (2008) yang menyatakan bahwa siapa yang menggunakan internet secara rutin dan efektif dalam kehidupan sehari-hari merupakan warga digital dan pandangan Prensky (2001) yang membagi digital native dan digital imigran. Digital native merupakan anak muda yang telah tumbuh dalam lingkungan teknologi digital dan secara naluri tampak memahami teknologi tersebut.

Fakta berikutnya adalah data kelas kontrol untuk kewarganegaraan digital termasuk dalam kategori kurang baik, sebab 63 dari 140 siswa mempunyai nilai

<85 dan masuk dalam kategori kurang baik dengan presentase sebesar 45%. Sementara itu kewarganegaraan digital kelas eksperimen masuk dalam kategori "kurang baik", sebab 65 dari 140 siswa mempunyai nilai <85 dan masuk dalam kategori baik dengan prosentase sebesar 63%. Kewarganegaraan digital tersebut diukur dari sisi hukum digital, etika digital, hak dan kewajiban digital. Dengan demikian sikap kewarganegaraan digital siswa masih kurang. Hal ini mendasarkan pada pandangan Branson (1995) bahwa terdapat tiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Winataputra (2001) bahwa pendidikan kewarganegaraan secara psikopedagogis/andragogis dan sosiokultural harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang secara psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan (*civic knowledge*), perwujudan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), penampilan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), pemilikan komitmen kewarganegaraan (*civic committment*), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (*civic confidence*), dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebajikan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*).

Fakta-fakta tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi PPKn. Peran apa yang dapat dilakukan PPKn untuk mengatasinya mengingat multi face/multidimensional PPN sebagaimana pendapat Winataputra (2007) yang menyatakan bahwa bidang kajian PKN dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi.

Budimansyah (2010) berpendapat bahwa pendidikan karakter dalam arti sempit dibebankan pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sedangkan pendidikan karakter dalam arti luas merupakan tanggung jawab semua mata pelajaran.

Sementara itu dalam perspektif Sapriya (2007) PKn memiliki kekhasan tersendiri bila dibandingkan dengan bidang studi lain yang sama-sama bertanggung jawab terhadap upaya pembentukan karakter warga negara. Pertama, perlu dipertahankan bahwa PKn bukan bidang yang monodimensional tetapi dia merupakan bidang yang multidimensional. Perannya bukan hanya dalam pengembangan konsep melainkan juga dalam pengembangan watak, bahkan ada misi pendidikan demokrasi. Kedua, PKn merupakan wahana pendidikan karakter bangsa, ketiga, PKn merupakan pendidikan nilai dan moral; keempat, PKn juga adalah pendidikan bela negara yang diwujudkan dalam kewiraan; kelima, PKn sebagai pendidikan politik karena PKn adalah wahana untuk membangkitkan kesadaran berpolitik dari warga negara, berpolitik secara cerdas. Keenam, PKn berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum, karena itu beberapa negara menggunakan nama yang dimaksud bukan *civic education* tetapi *law value values education*, bahkan ada *street law education*.

Pendidikan karakter dihadapkan pada pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta dampak yang mengiringinya maka menimbulkan tantangan baru. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ohler (2011) bahwa era digital membawa kita dalam era baru pendidikan karakter, yang ditujukan secara langsung terhadap peluang dan tantangan pada kehidupan gaya hidup digital. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kewarganegaraan digital merupakan pendidikan karakter bagi era digital.

Ribble dan Bailey (2007) yang menyatakan bahwa kewarganegaraan digital merupakan norma-norma kepatutan, perilaku bertanggung jawab terkait dalam menggunakan teknologi. Lebih lanjut ia menguraikan menjadi 9 unsur yaitu: akses digital, perdagangan digital, komunikasi digital, melek digital, etika digital, ketentuan digital, hak-hak dan tanggung jawab digital, kebaikan dan kesehatan digital dan keamanan digital.

Disisi lain ruang lingkup pendidikan pancasila dan kewarganegaraan antara lain meliputi: Persatuan dan Kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi. Norma sebagai salah satu kajian pendidikan pancasila dan

kewarganegaraan dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan kewarganegaraan digital. sementara itu unsur-unsur kewarganegaraan digital yang sesuai adalah etika digital, ketentuan digital, hak-hak dan tanggung jawab digital.

KESIMPULAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perilaku penggunanya. Berbagai persoalan terkait dengan penggunaan teknologi menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak diiringi dengan memberikan petunjuk norma bagi penggunanya. Dengan demikian menjadi salah satu tantangan bagi pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam arti luas menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran sedangkan dalam arti sempit dibebankan pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Kekhasan yang dimiliki oleh pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menjadikannya memiliki karakteristik tersendiri dalam melaksanakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada era digital merupakan kewarganegaraan digital. sementara itu untuk dilaksanakan dalam pembelajaran dapat melalui salah satu ruang lingkup pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yaitu norma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- APJII. (2014). *Profil Pengguna Internet*. Puskakom UI.
- Branson, Margaret S. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation.
- Budimansyah, Dasim. (2010), *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*, Widya Aksara Press, Bandung.
- Mossberger, Karen, Tolbert, Caroline J., dan McNeal, Ramona S. (2008). *Digital Citizenship, The Internet, Society, and Participation*. Massachusetts Institute of Technology.
- Ribble, Mike, Gerald Balley. (2007). *Digital Citizenship in Schools*, Washington: ISTE.

Winataputra, Udin S, Budimansyah, Dasim. (2007). *Civic Education konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.

Winataputra, Udin S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi*. Bandung, Program Pascasarjana UPI, Disertasi.

Jurnal

Ohler Jason. (2011). *Digital Citizenship Means Character Education for the Digital Age*. Kappa Delta Pi Record. 47; sup 1. 25-27. Fall.

Prensky, M 2001a; *Digital Natives, Digital Immigrants; On the Horizon*; NCB University Press, Vol 9 (5)

Prensky, M 2001b, *Digital Natives, Digital Immigrants part II: Do They Really Think Differently*; *On the Horizon*; NCB University Press, Vol 9 (6)

Sapriya. (2007). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa*. Jurnal Sekolah Dasar. Tahun 16. No. 1. Mei.